

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tata ruang dalam perkotaan lebih kompleks dari tata ruang pedesaan, kawasan di perkotaan biasanya dibagi dalam beberapa zona: perumahan dan pemukiman; perdagangan dan jasa; industri; pendidikan; perkantoran dan jasa; terminal; wisata dan taman rekreasi; pertanian dan perkebunan; tempat pemakaman umum; dan juga tempat pembuangan sampah.

Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak dijalankan, tidak terkecuali kawasan Kapten Mulyadi seperti saat sebelum penertiban dilakukan ialah kondisi kepadatan kawasan yang tidak terkendali seperti munculnya tempat-tempat kumuh, gangguan lalu lintas dan sistem transportasi, gangguan kesehatan dan sebagainya.

Melihat hal itu setiap kawasan harus mampu merealisasikan tata ruang yang baik untuk kenyamanan kotanya, hal ini yang mampu membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta membebaskan tata ruang wilayah di kawasan Kapten Mulyadi ini sehingga fungsi ruang publik atau zona hijau telah terpenuhi.

Surakarta saat ini dibandingkan Surakarta lima tahun lalu telah mengalami berbagai perubahan, yang mana kota ini telah mengalami perkembangan yang menjadikannya sebuah kota maju yang berkualitas dan memiliki identitas kota. Kota Surakarta mampu menempatkan diri sebagai kota teladan yang

mana perubahan kemajuan kota terutama dalam penataan kota sangat tampak hingga mampu menyedot perhatian masyarakat lokal, nasional hingga mancanegara.

Hal diatas sesuai dengan salah satu dalam pemberitaan yang ada dalam media Solo Berseri edisi 2 tahun 2011 yang mana Surakarta terpilih oleh *United Cities Local Goverment* (UCLG) menjadi pusat belajar bagi negara se-Asia Pasifik dalam persoalan penataan PKL. UCLG tertarik karena melihat Pemkot Surakarta mampu mengelola kota dengan menata PKL terutama saat relokasi yang tanpa adanya tindakan kekerasan

Perubahan kota yang telah terjadi di Surakarta berupa segi fisik maupun dari segi mental kepribadian masyarakatnya. Pada segi fisik, telah tampak adanya pembangunan pasar tradisional, pembangunan taman kota, pembebasan ruang hijau atau ruang publik, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pada segi mental kepribadian masyarakat kota telah terjadi perubahan yakni, penataan PKL dengan cara-cara yang baik dan manusiawi serta mampu membentuk kesadaran terhadap masyarakat Surakarta mengenai lahan-lahan yang mereka gunakan adalah lahan publik atau ruang kota yang bebas, yakni terbebas dari hal-hal tersebut.

Penataan PKL di kota Surakarta sangat menarik dan menyedot perhatian berbagai kalangan masyarakat, mulai dari para pemimpin atau pejabat di negeri ini, hingga rakyat kecil. Dimana penataan PKL yang telah dilakukan selama ini berjalan dengan lancar dan secara manusiawi tanpa ada kekerasan

atau konflik.

Jika diamati dalam beberapa pemberitaan di media massa berbeda halnya dengan penataan PKL di kota-kota lain di Indonesia yang hampir semua selalu diwarnai kericuhan ataupun kekerasan, seperti halnya yang terjadi pada proses penggusuran PKL di kawasan Mbah Priok Jakarta, penggusuran PKL di bantaran Setren Kali Kota Surabaya, di Jalan Untung Suropati Jember, dan terkini penggusuran di sepanjang jalan Mayor Oking Bogor, dan masih banyak di kawasan-kawasan lainnya.

Kegagalan atau ketidakberhasilan penataan PKL yang terjadi di beberapa daerah tersebut selarna ini diakibatkan karena tidak adanya komunikasi yang utuh antara pihak pemerintah dengan PKL serta juga adanya tindakan represif dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap para PKL.

Penataan PKL di kota Surakarta telah dilakukan diberbagai titik, seperti dimulai dari kawasan Monumen '45 Banjarsari, kawasan Manahan, kawasan Jalan Slamet Riyadi daerah Purwosari ke barat, kawasan dr.Wahidin, kawasan Jalan dr.Moewardi, kawasan timur PDAM, kawasan Lojiwetan, kawasan Taman Makam Pahlawan Jurug, kawasan pedaringan, kawasan Jalan Hasanudin, kawasan Mangkubumen, kawasan Jalan Ahmad Yani, kawasan Tentara Pelajar, kawasan Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Mayor Munaryo, kawasan Mayor Kusmanto, dan hingga menuju kawasan Jalan kapten Mulyadi Pasarkliwon.

Berbagai tempat penataan tidak ada satu penataan PKL dengan kekerasan

atau menimbulkan konflik, bahkan yang menarik, penataan dan pemindahan PKL tersebut diiringi dengan adanya Kirab Perpindahan (Kirab Budaya). Seperti yang terjadi pada saat pemindahan PKL di kawasan Monumen ‘45 Banjarsari yang berpindah ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi.

Penataan awal PKL di kota Surakarta yakni di kawasan Monumen 45 Banjarsari tersebut atas dasar aspirasi masyarakat terutama pejuang veteran 1945 agar monumen tersebut kembali menjadi fungsi sebagai ruang terbuka dan sebagai paru-paru kota dan diharapkan agar dapat dilaksanakan upacara 17 Agustusan di lokasi tersebut (SOLOPOS, 15/09/05).

Pemkot Surakarta mampu mengubah sikap alot para PKL terutama dua paguyuban yang ada yang sejak awal ngotot tidak mau dipindah menjadi mau dipindah. Pemkot memberikan solusi dan jaminan seperti pemberian modal kerja, pelatihan manajemen dan pemasaran, pemberian usaha, dan fasilitas los atau kios secara gratis, maka pada hari Rabu 19 Juli 2006 PKL membongkar kios mereka dan pada hari Minggu 23 Juli 2006 PKL berpindah ke lokasi baru dengan disertai kirab perpindahan yang diikuti permainan barongsai oleh walikota dan wakil walikota Surakarta (SOLOPOS, 22/10/05 dan SOLOPOS 02/05/06).

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti, penataan PKL di Jalan Kapten Mulyadi juga mampu dilakukan tanpa kekerasan dan tidak memakan waktu yang lama dan telah berhasil dilakukan pada saat yang lalu sebelum bulan suci Ramadhan 2010. Pembangunan di kawasan ini pada dasarnya adalah pelebaran Jalan Propinsi, namun pembangunan jalan harus

disertai dengan pembersihan wilayah atau kawasan dari PKL yang ada.

Penertiban dan penataan di kawasan ini menarik karena banyak kalangan ketika sebelum penataan tersebut berhasil, mereka menganggap masalah pembangunan ini sebagai isu belaka yang tidak akan mampu dicapai, hal ini didasarkan atas keadaan atau informasi mengenai pembangunan di wilayah Jalan Kapten Mulyadi ini yang sudah menjadi agenda puluhan tahun yang lalu, namun hanya menjadi sebuah isu belaka.

Kondisi Kawasan Kapten Mulyadi memang hampir sama dengan kondisi wilayah jalan lainnya yang ada di kota Surakarta ini yakni dipenuhi oleh PKL di pinggir jalan. Ratusan PKL memenuhi kawasan Kapten Mulyadi, yakni sekitar 239 PKL menurut data dalam salah satu media cetak dan tidak sedikit Pedagang Kaki Lima tersebut yang telah menggantungkan hidupnya dengan mengais rezeki di kawasan ini puluhan tahun, seperti pedagang bunga di perempatan Jalan Kapten Mulyadi Pasarkliwon.

Pada mulanya penataan di Jalan Kapten Mulyadi ini diawali dengan keluhan masyarakat, dan pada tahun 2006 Pemkot memberikan surat himbauan agar PKL yang berada di Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, dan Jalan Kyai Mojo agar merubah bangunan semi permanen dan permanen mereka menjadi bangunan bongkar pasang dan gerobak beroda. Namun hal tersebut ditolak oleh PKL karena mereka menganggap bahwa PKL yang ada sudah meminta izin mendirikan bangunan kepada pemilik bangunan dibelakang kios mereka (SOLOPOS, 19/07/06 dan SOLOPOS 20/07/06).

Pada tahun 2010 PKL Jalan Kpaten Mulyadi mendapatkan pemberitahuan

penataan kawasan disana, dan pada bulan Mei PKL mendapatkan instruksi agar membongkar kios mereka dan pindah ke tempat formal yang telah ditentukan paling lambat bulan Juni (SOLOPOS, 18/05/10).

Melihat kemajuan dan keberhasilan ini, maka telah menunjukkan bahwa Pemkot Surakarta mampu mengkomunikasikan pembangunan kota, sehingga dalam pandangan peneliti masalah penataan PKL di berbagai kawasan di wilayah Surakarta ini khususnya kawasan Pasarkliwon menarik untuk dilakukan penelitian karena data ini nantinya dapat dijadikan sebuah informasi bagi daerah-daerah lain untuk mengkomunikasikan pembangunan kotanya dengan pendekatan-pendekatan komunikasi yang manusiawi. Pada akhirnya skripsi ini mengambil judul **“Strategi Komunikasi Pembangunan Manusiawi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasarkliwon)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi komunikasi pembangunan secara organisasi Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasarkliwon?
2. Bagaimana pesan dalam strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasarkliwon?
3. Bagaimana konstituen menyikapi penataan yang dilakukan Pemerintah

Kota Surakarta yang melibatkan mereka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengkaji bagaimana secara organisasi strategi komunikasi pembangunan manusiawi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kapten Mulyadi kawasan Pasarkliwon
2. Untuk mengkaji bagaimana pesan yang disampaikan dalam strategi komunikasi pembangunan manusiawi yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta.
3. Untuk mengkaji bagaimana konstituen menyikapi penataan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, oleh peneliti diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah materi strategi komunikasi untuk mendiskripsikan informasi mengenai cara-cara manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta terhadap Pedagang Kaki Lima.

## 2. Manfaat Akademis/Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam kajian Komunikasi Pembangunan.